

Konsepsi Dan Tolok Ukur Ketahanan Regional¹⁾

Prima Roza, Sutan Adjamsyah, Nining Respati,
Siti Kusumawati Azhari, Rr. Sri Wachyuni,
Ronny Hendrawan, Dicky R Munaf²⁾

Abstract

The development of interaction among people is nowadays very much influenced by two contradictory factors. They are the unifying interest and tribalism. The later is not in a context of traditional anthropology. The fact can be seen from the trend of regionalism recently, particularly in the region of North America, Asia Pacific, and Europe. In the effort of balancing the competitive ability among the three regions, and in making them synergized, it is necessary to pay close attention to the formation of competitive supremacy from time to time. Besides that, since regionalisation involves a group of countries, each of which has each own national interest, it is necessary that the synergy effort has to be led to a balance on the similar element/feature, and not the effort of interest accumulation of each country member of a region. Within this context, this study is conducted with reference to the above mentioned principles, and it is focused mainly on the ASEAN region in which Indonesia is the most influencing country member. The study focuses on the current regionalisation development of the three main regions. Also, the study predicts the targets they intend to achieve by identifying the dominant parameters for the targets and correlates the parameters with the targets. In addition, the extrapolation towards the globally shared values into the concept of Indonesia's National Resillience is done. The extrapolation is done to enrich the concept of Indonesia's National Resillience, and the result of which can further be used to strengthen the regional resillience concept. This enriched regional resillience concept is then translated into quantitative parameter which are adopted as the indicators of the regional resillience concept.

Pendahuluan

Berakhirnya perang dingin telah menciptakan lingkungan internasional baru yang ditandai oleh perubahan yang cepat dan ketidakpastian. Perubahan yang terpenting adalah terbentuknya modal nonkonvensional yang mempunyai dampak sangat besar bagi budaya manusia secara

keseluruhan, khususnya cara manusia dan bangsa-bangsa memenuhi kebutuhan hidupnya yang terus meningkat.

Dibanding dengan faktor-faktor produksi yang standar telah muncul faktor baru secara menonjol, yaitu pengetahuan, informasi, dan inovasi. Manifestasinya dapat dilihat pada terus meningkatnya kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, dan kaji ulang dari berbagai informasi dan berkembangnya suatu masyarakat

¹⁾ Penyempurnaan lanjut dari makalah
Jurnal Ketahanan Nasional, 2000

²⁾ Tim Pengajar PPKN, KK-Ilmu
Kemanusiaan FSRD ITB.

informasi yang terdiri atas para manusia yang hidup dan berkarya di bidang pendayagunaan informasi yaitu yang mengandalkan pengetahuan dan daya nalarnya.

Selain itu, hal-hal yang mempengaruhi adalah sistem internasional yang merupakan jaring antar negara-bangsa, masing-masing negara mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan politik, ekonomi, dan hubungan fungsional lainnya. Siapa yang lebih mempengaruhi siapa, ditentukan oleh struktur posisi relatif dari kekuasaan (*power*) dan pengaruh (*influence*), norma-norma perilaku (*behavior*), serta partisipasi proaktif yang membentuk interaksi fungsional negara-negara itu. Ciri-ciri struktural dan fungsional dari interaksi itu berubah dari waktu ke waktu dengan berubahnya kemampuan relatif dan motivasi dari para pelaku interaksi, dalam hal ini anggota sistem internasional tersebut.

Selain interaksi antar pemerintah dan antar negara dengan lembaga internasional, sistem internasional juga mencakup hubungan melewati wilayah nasional yang dilakukan melalui antar organisasi swasta, antar kelompok dan perorangan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan ekonomi, ilmiah, agama, pendidikan, kemanusiaan, hak asasi, kebudayaan, dan lain-lain. Daya mampu dan kekuatan negara-negara tidak pernah konstan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak merata di antara masyarakat-masyarakat serta terobosan modal faktor produksi baru dan organisasional yang memberi keuntungan-keuntungan lebih besar

bagi suatu masyarakat dibanding masyarakat lainnya.

Berbagai interaksi dan perkembangan ini mempengaruhi keadaan dan perkembangan dalam negeri setiap negara. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa negara merdeka (*independent*) itu saling bergantung (*interdependent*) secara internasional dengan kata lain, berintegrasi. Semakin besar saling ketergantungan, atau integrasi itu, semakin berkurang negara individual menentukan sendiri politik dalam negeri maupun luar negerinya. Hubungan dan interaksi semakin tunduk kepada berbagai pengaturan. Dalam sistem internasional dengan tingkat integrasi tinggi, interaksi antar anggotanya lebih stabil dan lebih dapat diramal. Sebaliknya, semakin sedikit interaksi dan hubungan, dengan kata lain, dalam sistem internasional yang longgar, semakin besar pula kebebasan dan kemandirian negara individual untuk menentukan sendiri keinginan dan perkembangannya. Akan tetapi, dalam sistem yang longgar itu, keadaan menjadi cair (*fluid*), sulit diperkirakan, dan menjadi kurang stabil.

Mencermati kecenderungan interaksi kehidupan manusia di seluruh dunia dalam satu dasawarsa terakhir ini, dapat diamati adanya fenomena **Ambivalensi Globalisasi** dalam interaksi kehidupan tersebut, yaitu ditandai adanya upaya penyatuan tujuan hidup (*unifying effect*), sedangkan di lain pihak timbul kesadaran akan kebutuhan pengakuan hak pribadi atau hak kelompok. Khusus untuk aspek yang kedua ini ada kecenderungan

terkikisnya pandangan pentingnya kolektivitas oleh tribalisme yang dicirikan dengan penonjolan kepentingan masing-masing kelompok atau unit sosial.

Paradigma kehidupan manusia tersebut di atas akan mengakibatkan makin pentingnya interaksi antarunit sosial atau bangsa yang mungkin memiliki kepentingan berbeda, sehingga jalinan interaksi ini menjadi dominan dalam pencapaian ketenteraman kehidupan manusia. Jalinan ini akan rentan terhadap gangguan perbedaan kepentingannya terhadap unit sosial lain. Fenomena ini didefinisikan sebagai aspek **Kaotik** (*chaotics*) kehidupan manusia, artinya potensi dalam kehidupan manusia yang mampu merusak namun dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia tersebut jika sifat pretoriannya dapat dimanfaatkan (*nonkaotik*). Aspek ini terkait dengan societal yang diakibatkan oleh peningkatan peradaban manusia yang diejawantahkan dalam bentuk Tingkat Partisipasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, paradigma interaksi kehidupan manusia secara lengkap dapat dicirikan oleh 3 parameter utama yang meliputi statis (sumber daya), dinamis (aspek yang melandasi interaksi kehidupan), dan kaotik (aspek yang mampu bersifat pretorian dalam kehidupan manusia). Ketiga parameter ini merupakan pemicu bagi makin eratnya interaksi kehidupan manusia yang mungkin keeratan tersebut dapat ditingkatkan dengan partisipasi kaotik bagi terbentuknya landasan baru terhadap tatanan interaksi kehidupan manusia tersebut.

Mengawali pembahasan ketahanan suatu negara maupun ketahanan regional tempat negara tersebut berada, perlu dimulai dari pengertian bahwa setiap bangsa yang telah bernegara memiliki tujuan nasional sebagai pengejawantahan cita-cita nasionalnya yang mungkin dilandasi oleh falsafah dan ideologi bangsa tersebut. Tujuan nasional tersebut direpresentasikan dalam bentuk pembangunan nasional yang pasti memerlukan interaksi dengan negara lain selain mensinergikan interaksi potensi internal dalam bangsa tersebut. Namun, proses pencapaian tujuan nasional tersebut selalu menghadapi Tantangan, Ancaman, Hambatan, dan Gangguan (TAHG) dari sisi internal maupun eksternal, sehingga untuk menanggulangi, bahkan memanfaatkan TAHG tersebut setiap bangsa harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatannya sendiri. Hal ini disebut Ketahanan Nasional, sedangkan ketahanan bersama negara lain dalam konteks wilayah tertentu, disebut Ketahanan Regional. Bertolak dari uraian di atas, model Konsepsi Ketahanan Regional dengan kerangka pikir untuk mampu menciptakan keuletan dan ketangguhan dengan melibatkan parameter interaksi kehidupan manusia yang proaktif akan diuraikan, demikian pula instrumen yang diperlukan untuk menilai konsep tersebut yang dituangkan dalam tolok ukur akan dijelaskan dalam makalah ini. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menyumbangkan pemikiran tentang hal yang strategis dari konsepsi ketahanan regional yang berorientasi memperkuat solidaritas politik dan kerja sama

disegala bidang demi tercapainya tujuan bersama dalam menghadapi akselerasi peradaban manusia.

REGIONALISME GLOBAL DAN ASIA TENGGARA

Fenomena interaksi kehidupan manusia tampak menonjol yaitu maraknya pengelompokan regional. Kelompok-kelompok yang mengambil peran dalam basis ini, baik politik maupun ekonomi, sudah berjalan sejak lama, namun selama itu tertutupi oleh persaingan kekuatan bipolar. Hilangnya ketegangan dunia memunculkan kelompok ini ke depan panggung internasional. Selain itu, kecenderungan regionalisasi juga terpacu dengan sulitnya perundingan perdagangan multilateral. Kekhawatiran kegagalan forum multilateral ini dan hilangnya persaingan politik global mendorong meningkatnya pengelompokan regional tersebut. Peningkatan regionalisme tersebut turut dipengaruhi oleh tanggapan terhadap perkembangan kelompok-kelompok satu sama lain. Dengan demikian, perubahan pola dari bipolarisme ke multipolarisme turut memasukkan kelompok-kelompok regional ini bersama-sama negara secara individual ke dalam berbagai sentra kekuatan meski dengan kualitas yang berbeda.

Pada dasarnya, pengelompokan regional dapat dilihat sebagai proses atau upaya yang pada akhirnya menuju pada penyatuan (integrasi) ekonomi dan mungkin politik. Teori klasik menyebutkan terdapat tujuh tahapan menuju integrasi ekonomi (dan politik), yaitu.

Pertama adalah *Free Trade Area* (FTA), semua hambatan perdagangan baik tarif maupun nontarif dihapus pada kawasan perdagangan, namun masing-masing anggota kelompok masih mempertahankan aturan tarifnya dengan negara ketiga di luar kawasan.

Kedua adalah *Custom Union* (CU), selain memberikan kemudahan seperti dalam FTA, mempunyai kebijakan tarif bersama terhadap negara ketiga.

Ketiga adalah *Common Market* (CM) selain mengatur perdagangan barang juga mengatur faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang bebas bergerak dalam kawasan tersebut.

Keempat adalah *Economic Union* (EU) merupakan perluasan CM dengan aspek koordinasi (dan harmonisasi) kebijakan ekonomi, pengaturan pasar, kebijakan moneter, hingga kebijakan redistribusi pendapatan, sehingga dikatakan EU memiliki kebijakan perdagangan bersama.

Kelima adalah *Monetary Union* (MU) yang menentukan nilai tukar mata uang negara anggota dan konvertabilitasnya, atau kesepakatan akan satu mata uang yang berlaku di seluruh negara anggota. Pada tahap MU ini sudah terdapat tingkat integrasi yang tinggi di bidang makro ekonomi dan kebijakan anggaran.

Keenam adalah *Economic and Monetary Union* (EMU) menggabungkan isi EU dan MU yang bergerak bersamaan.

Ketujuh adalah *Full Economic Integration* (FEU) merupakan penyatuan total semua sendi perekonomian negara anggota. Keadaan dalam FEU sudah seperti pengaturan dalam sebuah negara.

Dalam kerangka tersebut, UE dan ASEAN merupakan contoh kelompok regional yang meningkatkan intensitas integrasi dan kerjasamanya seiring dengan turut serta hilangnya ketegangan dunia, meski dengan tahapan yang berbeda. Jika ASEAN masih baru dengan FTA, Uni Eropa telah jauh lebih maju memasuki tahap EMU di akhir abad 20. Peningkatan atau penguatan regionalisme dalam gambar baru dunia terlihat dalam *Traktat Maastricht* dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang merupakan wujud langsung dari kebutuhan tersebut. *North America Free Trade Area* (NAFTA) dan APEC, di pihak lain, dapat dipandang sebagai alternatif baru terhadap kekhawatiran gagalnya sistem multilateralisme. Di samping merupakan tanggapan terhadap perkembangan *eksklufisme* integrasi Eropa serta alat AS untuk menekan Uni Eropa dalam perundingan GATT, yang terpenting fenomena tersebut mempercepat evolusi setelah Perang Dingin berlalu.

Dalam masa peralihan setelah Perang Dingin diperlukan kejelian masing-masing negara untuk memanfaatkan berbagai perkembangan dan pergeseran politik maupun ekonomi yang muncul seiring dengan proses pembentukan tatanan internasional baru. Dari proses integrasi Eropa, dapat dilihat tiga ciri pokok pendekatan yang dilakukan, yakni **legalitas, institusionalitas, dan supranasionalitas**. Legalitas

mengacu pada amat kuatnya kandungan hukum dalam proses integrasi. Semua kesepakatan dituangkan ke dalam traktat yang mengikat. Selain itu, kesepakatan ditulis secara rinci tanpa memberi peluang interpretasi ganda. Dengan latar belakang demikian, UE tumbuh menjadi sosok yang ada saat ini, sebuah kekuatan ekonomi nyata namun yang masih mencoba tampil kompak dalam bidang politik. Di bidang ekonomi, UE adalah subyek hukum internasional sebagaimana layaknya negara, menjadi anggota PBB, menentukan kebijakan tunggal, atau melakukan perundingan. Di bidang politik, UE tak ubahnya sekumpulan negara yang mencoba bekerja sama untuk menjalankan kebijakan yang sama. Sebuah pekerjaan rumah UE lain yang berat selain masalah pendalaman kualitas integritas, menuju EMU (*deeping*) adalah masalah pelebaran cakupan integrasi dengan memperluas keanggotaannya (*widening*). Keberhasilan integrasi ekonomi UE telah membuat negara-negara sekitar tertarik untuk bergabung.

ASEAN, di pihak lain, menunjukkan proses dan sifat yang berbeda walau dengan hasil yang secara relatif sama. Yang harus diingat pertama kali adalah proses yang selama ini berjalan di ASEAN bukan merupakan upaya integrasi, tetapi kerja sama. Asean didirikan pada 1967 di bawah bayang-bayang Perang Vietnam dan meningkatnya kebangkitan gerakan komunisme di kawasan itu, motivasi menonjol dalam pembentukan ASEAN adalah faktor politik dan keamanan. *Deklarasi Bangkok* yang mendasari pembentukan ASEAN menyebutkan

kerja sama ekonomi dan sosial adalah masalah-masalah politik yang menjadi agenda utama ASEAN dalam dua dekade pertama. Setelah kesamaan persepsi berhasil dibangun dan dasar-dasar filosofis berhasil ditegakkan, kemudian ASEAN mengisi kerangka tersebut dengan kerja sama ekonomi yang lebih substansial. Hal tersebut mengemuka/dibincangkan pada KTT IV di Singapura pada tahun 1992 yang menyepakati untuk membentuk AFTA dan terealisasi pada tahun 2003 yang lalu.

Dalam konteks ini dapat dilihat prioritas pertama kerja sama ASEAN adalah membiasakan berdialog satu sama lain, saling mengerti dan menghormati, dan berkawan. Lambatnya kerja sama ASEAN pada tahun-tahun pertama banyak disebabkan oleh terserapnya sebagian besar perhatian pada usaha untuk membangun rasa percaya bahwa saling membutuhkan dan dapat bekerja sama untuk membangun kawasan dan menyepakati segala sesuatu harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai konsensus. Deklarasi Bangkok dapat dilihat sebagai komitmen politik negara-negara anggota untuk bersatu dan bekerja sama tanpa mengurangi kedaulatan nasional masing-masing negara dalam mengupayakan stabilitas politik kawasan yang dapat menunjang pembangunan nasional. *Declaration of ASEAN Concord Treaty of Amity and Cooperation* (1976) adalah tonggak-tonggak penting dalam tahap ini. Meskipun demikian, tidak berarti ASEAN mengabaikan kerja sama ekonomi seperti disebutkan oleh Deklarasi Bangkok. Kerja sama

ekonomi ASEAN dapat dibagi ke dalam empat tahap : 1967-1976, 1976-1987, 1987-1992, dan 1992-sekarang.

Keberhasilan dan ketahanan ekonomi ASEAN bersama negara-negara Asia Timur lain, meskipun masih lebih banyak disebabkan oleh upaya individual dari pada hasil kerja sama dalam kerangka ASEAN, telah meningkatkan kepercayaan diri ASEAN untuk meningkatkan perannya dalam turut menyusun gambar baru hubungan internasional setelah Perang Dingin.

Selain itu, ASEAN adalah minimalis, ini terlihat dari relatif sedikitnya pertemuan formal. Hingga 40 tahun usianya, ASEAN baru mengadakan tujuh kali KTT formal dan dua kali KTT informal serta pertemuan tahunan tingkat menteri. Penampilan yang lebih banyak bersifat informal dan kuatnya hubungan pribadi (*personalized*) itu menunjukkan kualitas institusionalisasi yang secara mencolok berbeda dengan Uni Eropa.

Ciri lain adalah ketahanan regional. Konsep Indonesia ini diterima sebagai konsep dasar ASEAN mensyaratkan adanya ketahanan kolektif dari ketahanan nasional masing-masing negara anggota untuk memperoleh ketahanan regional. Konsep ini banyak dilandasi oleh pemikiran bahwa negara dunia ketiga seharusnya bekerja sama mengerahkan kekuatan untuk mengurangi ketergantungan politik-ekonomi mereka dari negara G-8. Semangat ini terlihat nyata ketika negara-negara berkembang

mengampanyekan Tata Ekonomi Dunia Baru melalui kerja sama Selatan-Selatan, untuk menghapuskan ketergantungan terhadap negara-negara maju dengan memobilisasi sumber daya dan kemampuan sendiri. Namun terlalu besar dan beragamnya kepesertaan kelompok membuat penyaluran aspirasi tersebut banyak disandarkan pada ketahanan kolektif kawasan.

Tersirat bahwa ASEAN percaya bahwa dengan ketahanan nasional yang kuat akan menciptakan ketahanan regional yang kokoh dan pada gilirannya menampilkan ASEAN yang solid. Berdasarkan konsep ini, kerja sama tidak harus berujung pada integrasi, namun lebih mengarah pada alat untuk membangun kekuatan dan kedaulatan nasional. **Jadi, nasionalisme tetap merupakan faktor pendorong yang kuat.** Meski diakui bahwa keberhasilan ekonomi anggota ASEAN sampai saat ini masih banyak disebabkan oleh keberhasilan individual dari pada hasil kerja sama kawasan, namun kondisi kerja sama ASEAN yang demikian merupakan dasar yang kokoh dalam meningkatkan penampilan ASEAN seperti terbukti selama ini.

ASEAN bahkan Asia menentang pengaitan perdagangan atau bantuan pembangunan dengan isu-isu seperti demokrasi, hak-hak azasi manusia, atau lingkungan hidup dan menganggap sikap tersebut sebagai pemaksaan penerapan nilai-nilai Barat di dunia Timur. Penolakan ini semakin keras sejalan dengan menguatnya kepercayaan diri Asia yang berasal dari keberhasilan pembangunan ekonomi mereka.

Keberhasilan tersebut memunculkan identitas kawasan yang dilandaskan pada nilai budaya Timur sebagai alternatif yang setaraf dengan atau bahkan lebih dari nilai-nilai Barat, yang oleh Asia justru dipandang sedang runtuh. Perdebatan tentang nilai ini terlihat menonjol hingga paruh pertama 1990-an. **Secara ideologis, universalisme Barat memperoleh tantangan dari relativisme Asia.**

Berbeda dengan konsep individualisme, budaya Asia lebih menekankan pada hak ulayat, kesatuan dan persatuan, keharmonisan sosial, musyawarah dan mufakat, atau penghormatan terhadap pemimpin. Dengan prinsip kemasyarakatan tersebut, perorangan tidak saja memiliki hak, namun juga kewajiban dan tanggung jawab yang sering harus diutamakan jika keselarasan sosial terganggu. Asia berkeyakinan bahwa hak-hak azasi manusia harus dipahami dalam konteks budaya, sejarah dan ekonomi suatu negara. Selama kemiskinan masih membelit, hak sosial dan ekonomi memperoleh prioritas utama di atas hak-hak politik.

LINGKUNGAN STRATEGIS DALAM INTERAKSI KEHIDUPAN MANUSIA

Proses globalisasi itu juga didorong oleh lahirnya satu wadah global, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada penghujung PD II, yang beranggotakan semua negara-bangsa itu, baik negara-negara "tua" (berusia lebih kurang 200 tahun), maupun negara-negara yang baru merdeka setelah PD I dan terutama setelah PD II, serta negara-negara yang mungkin masih akan lahir lagi. Terdapat

disparitas yang sangat besar dan beragam antara negara-negara tersebut, praktis meliputi semua unsur pembentuk kemampuan nasional, seperti homogenitas etnik, ukuran besar negara, tersedianya sumber daya alam, agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, tingkat kemajuan.

Disparitas besar beragam itulah yang menimbulkan ketergantungan internasional (dalam rangka interdependensi internasional). Tidak ada atau sangat kurangnya berbagai sumber daya itu menimbulkan kelemahan-kelemahan pada banyak negara berkembang, apalagi negara-negara termiskin. Untuk dapat melanjutkan hidup, mereka membutuhkan sumber-sumber dari luar seperti bantuan ekonomi; bantuan kemanusiaan; bantuan dalam bencana-bencana alam seperti musim kering, banjir, gempa, bantuan militer untuk membentuk dan memelihara kemampuan militer yang paling sederhana sekalipun (yang tak jarang digunakan untuk kepentingan para penguasa); dan pasar bagi ekspor komoditas primer jika ada.

Di samping negara-negara adidaya, besar, sedang, kecil, dan lemah itu, terjadi pula pertumbuhan yang proliferaif dari berbagai sektor (unit) nonnegara yang juga dapat sangat mempengaruhi agenda internasional. Di antaranya yang terpenting adalah :

a. Aktor Teritorial Non-negara (ATN) seperti PLO yang duduk dalam PBB dengan status peninjau dan berbagai gerakan "pembebasan nasional" lainnya,

seperti berbagai faksi di Somalia, Afganistan, Basque di Spanyol; Kurdi di Irak - Turki - Iran - Armenia. Berbagai ATN ini mempengaruhi lingkungan politik internasional dan regional.

b. Aktor Non-teritorial Transnasional (ANT) seperti perusahaan-perusahaan multinasional (MNC). Jika MNC terutama bergerak di bidang ekonomi nasional dan internasional (tetapi ada kalanya juga politik nasional negara-negara lemah), ciri-ciri ANT sebagai berikut :

- 1) Mempunyai aktivitas terorganisasi yang berlangsung bersamaan dalam beberapa negara sekaligus.
- 2) Mempunyai sasaran-sasaran yang tidak berhubungan dengan kepentingan-kepentingan negara individual.
- 3) Mempunyai unsur-unsur komponen yang secara esensial bersifat non politik.

c. Organisasi-organisasi antar pemerintah (intergovernmental organization, atau IGO), seperti PBB dengan segala agen spesialis. IGO sering mempunyai pengaruh besar dalam dimensi internasional dan mempengaruhi pula agenda domestik negara-negara anggota-nya, tetapi kadang-kadang kebijakannya dapat pula bertentangan dengan kebijakan satu atau lebih anggotanya. Dengan semakin padatnya jaringan hubungan-hubungan internasional karena pertumbuhan transaksi-transaksi sosial, komersial dan komunikasi, keperluan untuk kerja sama dan

koordinasi antar pemerintah meningkat pula.

d. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (lebih dengan sebutan NGO). Melalui lembaga-lembaga NGO ini rakyat seluruh dunia dapat saling bertemu dan bertukar pikiran dalam berbagai bidang sosial budaya, kemanusiaan, dan lingkungan hidup. NGO merupakan bentuk yang paling efektif dalam meletakkan landasan-landasan dan penyelenggaraan hubungan *people to people*.

Semua lembaga tersebut di atas ikut dalam pentas internasional. Dapat dibayangkan betapa kompleksnya sistem internasional yang global itu. Tidak mungkin semua negara di dunia dapat ikut berkibrah dalam semua aspek dan dimensi sistem internasional tersebut. Meskipun semua unsur itu berperan, namun negara-bangsa tetap merupakan pemain yang terpenting. Oleh karena itu,

- a. Hanya negaralah yang mampu menggalang kesetiaan dari rakyat yang menghuni suatu teritori tertentu.
- b. Hanya negaralah yang mampu mengerahkan segala sumber daya untuk mengatasi ancaman terbesar (perang).
- c. Hanya negara pulalah yang memiliki konsep yang meliputi keseluruhan masalah yang menyangkut kesejahteraan dan keamanan semua rakyat.
- d. Hanya negara yang memiliki kedaulatan.

Dengan hadirnya strata tersebut, setidaknya kini dapat diidentifikasi

lima tingkat pengambilan keputusan dalam hubungan internasional, yakni aturan global dan multi lateral seperti WTO dan konvensi internasional lain; dialog antarkelompok regional seperti APEC, atau ASEM atau ASEAN-NAFTA/ ASEAN-Mercosur, kelompok sub-regional seperti BIMP-EAGA, Sijori; dan hubungan bilateral antarnegara.

Dari kelima tingkatan itu, tingkatan yang didasarkan pada hubungan antar kelompok menunjukkan peran yang semakin penting dalam hubungan internasional. Sementara itu, mengingat semakin banyaknya pelaku politik internasional dengan heterogenitas dan keragaman kepentingan terasa semakin sulit untuk mencapai kemufakatan ditingkat global/ multilateral. Sebagai contoh adalah lamanya perundingan dalam kerangka GATT. Keadaan ini belum ditambah dengan keharusan ratifikasi yang juga memakan waktu lama, sedangkan arti penting peran interaksi bilateral pun, di sisi lain, turut menurun, seperti ditunjukkan oleh banyaknya keputusan yang ditentukan oleh interaksi tingkat di atasnya, seperti persoalan lingkungan hidup, perdagangan, atau investasi.

Dengan demikian, hubungan antar kelompok regional itu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi proses institusionalisasi hubungan internasional. Desakan-desakan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan kebutuhan untuk mengkom-promikan pemecahan dalam dan antara kelompok-kelompok regional itu akan menciptakan satu tingkat interaksi tersendiri di luar

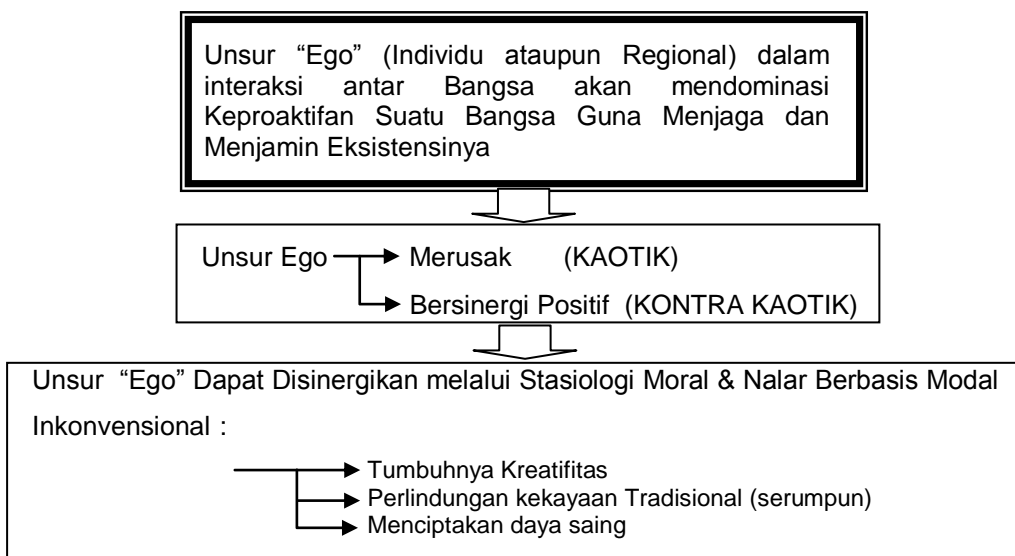
struktur dialog yang telah ada. Dilandasi oleh paradigma baru kualitas interaksi manusia dalam berbangsa dan bernegara baik dalam konteks global maupun regional dapat dilihat bahwa terdapat suatu parameter kehidupan yang akan mendominasi kualitas hidup manusia yang dapat diakomodasi oleh aspek statis dan dinamis yang selama ini ada, yaitu kemampuan antisipasi partisipatif yang didukung oleh jaringan berlapis. Adapun alasan tidak terakomodasinya parameter tersebut pada aspek statis dan dinamis adalah dilandasi oleh kedua aspek tersebut yang tidak mampu memberi koridor yang dapat digunakan untuk antisipasi proaktif guna meningkatkan peradaban manusia. Di lain pihak, parameter kaotik adalah suatu parameter yang mengandalkan kecerdasan manusia dalam upayanya memiliki daya saing untuk berperan dalam dunia global.

Kecerdasan manusia merupakan faktor pendorong bagi suatu bangsa

yang dapat berpikiran ganda, yaitu sebagai modal persaingan sekaligus dapat juga menjadi sarana perusak tata kehidupan jika tidak diimbangi moral yang mantap. Unsur utama dari parameter kaotik adalah :

- Tumbuhnya kreativitas
- Perlindungan kekayaan tradisional
- Kemampuan menciptakan daya saing

Ketiga unsur parameter kaotik tersebut timbul dari sikap suatu bangsa sebagai implementasi dari keinginannya untuk dapat diakui di dunia ini dengan memberikan sentuhan konstruktif bagi tingkat peradaban manusia yang strateginya perlu dilakukan dengan berjenjang bergantung pada tingkat aplikasi dari unsur parameter kaotik ini. Proses proses identifikasi ketiga unsur utama di atas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Identifikasi Unsur Parameter Kaotik

KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL

Berlandaskan kecenderungan para-digma interaksi kehidupan berbangsa semakin disadari bahwa kepentingan dan kebutuhan suatu negara tidak lagi mungkin dipenuhi mandiri dan terlepas dari masyarakat dunia sehingga ketahanan suatu bangsa mutlak diperlukan. Dalam konteks ASEAN, Indonesia merintis upaya untuk membina suatu Ketahanan Regional ASEAN mengingat kawasan ini selalu menjadi obyek kekuatan luar dan tidak pernah menjadi motivator untuk lingkungannya sendiri apalagi untuk lingkungan luar.

Konsep Ketahanan Regional ASEAN ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan konsep dasar bahwa "*Common denominator*" kepentingan nasional masing-masing anggota harus dapat diserasikan kemudian disinergikan menjadi suatu ketangguhan dan keuletan kawasan. Ketahanan Regional bukanlah jumlah total dari Ketahanan Nasional masing-masing anggota.

Bertitik tolak dari konsep dasar di atas, Ketahanan Regional hanya dapat dicapai dengan membangun manusia sebagai pelaku interaksi. Makalah ini akan menjelaskan konsepsi dasar dan tolok ukur Ketahanan Regional ASEAN berlandaskan Visi "ASEAN 2020 : *Partnership in Dynamic Development*" yang telah diacu oleh seluruh anggota ASEAN dalam menetapkan strategi pembangunan nasionalnya. Artinya Visi ini adalah penyelaras awal dari segenap proses pembangunan para anggota ASEAN. Mengacu pada titik

sentral pengertian bahwa pembangunan manusia adalah unsur utama dari proses sinergi ketahanan regional dan digabung dengan adanya gejala pentingnya parameter kaotik dalam menentukan kualitas interaksi antar bangsa, maka konsepsi Ketahanan Regional yang akan dikembangkan akan mengoptimalkan pandangan perlunya meninjau aspek statis dan aspek dinamis dengan suatu koridor aspek kaotik sehingga diperoleh mekanisme sinergi kepentingan nasional anggota ASEAN tanpa melibatkan unsur-unsur yang memang tidak dapat disinergikan sesuai kepentingan masing-masing anggota, karena dengan melibatkan hal itu justru mungkin akan timbul konflik.

Terkait dengan penjelasan di atas, Konsepsi Ketahanan Regional ASEAN adalah konsepsi pengembangan kekuatan Regional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam aspek kehidupan berpotensi yang utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan pada kepentingan yang sama, searah, dan bersifat proaktif untuk memperoleh daya saing. Jadi kata kunci dalam ketahanan regional adalah Serasi, Proaktif, dan Institusional.

Satu hal yang penting juga bahwa Ketahanan Regional ini perlu dievaluasi secara periodik sehingga dapat dinilai kecenderungan perubahannya dengan transformasi dari waktu ke waktu yang dinyatakan dengan pemetaan. Namun demikian mengingat sampai saat ini belum ada indikasi nilai Ketahanan Regional,

Konsepsi dan Tolok Ukur Ketahanan Regional

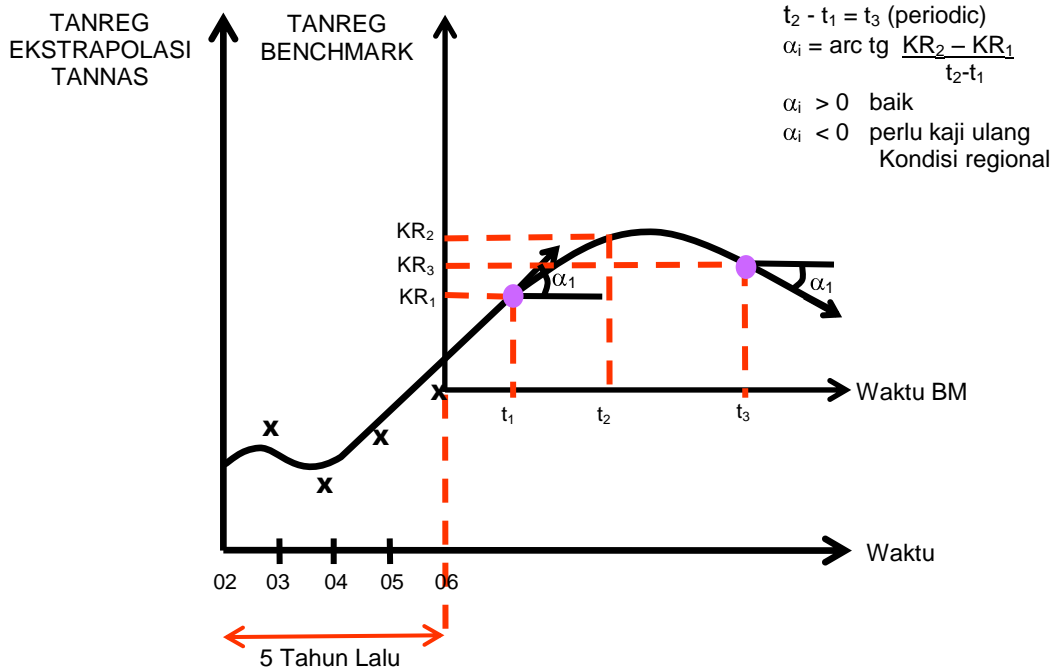
untuk menentukan *Benchmark* Nilai Ketahanan Regional dilakukan transformasi nilai Tannas ke Tanreg dengan formulasi sebagai berikut

$$\left(\frac{\text{Nilai Statis} + \text{Nilai Dinamis}}{100} \times \text{Nilai Tannas} \right) + \text{Nilai non Kaotik}$$

Kemudian regresi nonlinier dengan derajat kepercayaan antara 99 ÷ 100% diaplikasikan pada Nilai Tanreg transformasi seperti ditunjukkan pada gambar 2.

Kemampuan antisipasi dari satu kawasan pada suatu rentang waktu jika nilai α adalah negatif maka dapat

dirancang kegiatan yang mampu menjadi pendorong agar nilai α pada waktu berikut adalah positif. Demikian pula jika nilai α positif, laju antisipasi adalah yang diinginkan dengan nilai proporsional. Kembali pada pengertian dasar Ketahanan Regional ASEAN yang merupakan sinergi dari unsur-unsur yang serasi di antara negara-negara anggota yang tidak mempertimbangkan unsur yang merupakan kekhasan dari tiap negara anggota maka Ketahanan Regional ASEAN khususnya diusulkan mempunyai unsur keterkaitan sebagai berikut :



Gambar 2. Pemetaan Ketahanan Regional

STATIS

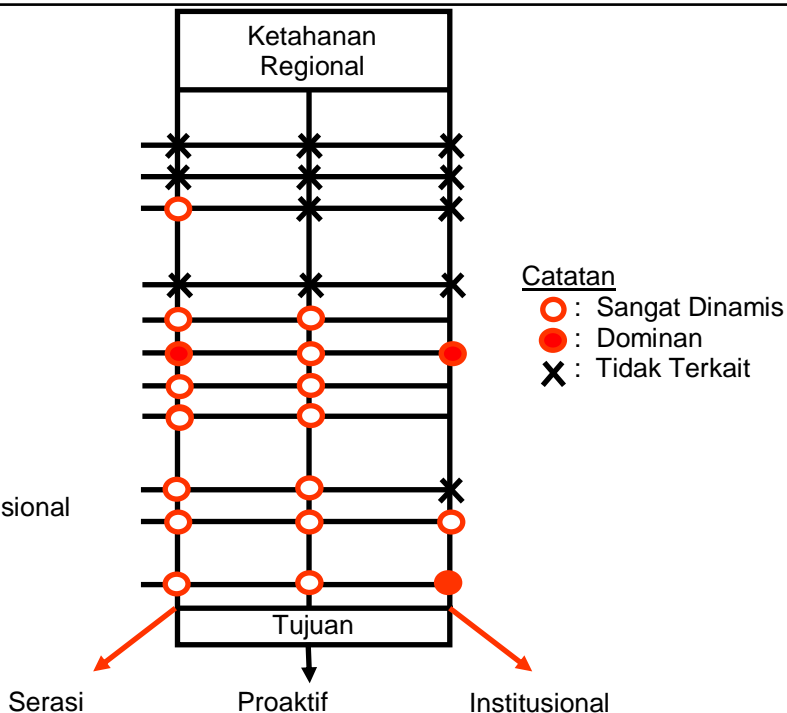
- o Geografi
- o Demografi
- o SKA

DINAMIS

- o Ideologi
- o Politik
- o Ekonomi
- o Sosial Budaya
- o Hankam

KAOTIK

- o Kreatifitas
- o Kekayaan Tradisional
- o Daya Saing



Gambar 3. Pohon Keterkaitan Unsur Ketahanan Regional

Nilai Transformasi Tannas ke Tanreg $\left(\frac{51,5xz}{100}\right) + 48,5$ nilai 51,5 dan 48,5 diperoleh dari analisis tolok ukur ketahanan regional yang diusulkan seperti tabel 1.

TOLOK UKUR KETAHANAN REGIONAL

Rumusan tolok ukur Ketahanan Regional yang diusulkan adalah yang didasarkan pada unsur-unsur yang tersebut pada pohon keterkaitan unsur yang telah disebut pada pasal sebelumnya. Pohon keterkaitan tersebut mempunyai keterkaitan unsur

yang timbal balik, saling bergantung dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dengan demikian, Ketahanan Regional adalah pengertian holistik dengan kelemahan satu gatra akan mengakibatkan kelemahan unsur lainnya dan mempengaruhi totalitas konfigurasi dan kondisi Ketahanan Regional secara total dan Ketahanan Nasional anggota secara parsial.

Tabel 1. Pembobotan Ketahanan Nasional

NO	ASPEK	KOMPONEN	BOBOT	
			TANNAS-LEMHANNAS	USULAN TANREG
1	STATIS	- Geografi	5	0
		- Demografi	15	0
		- SKA	5	$1/3 \times 5 = 2$
2	DINAMIS	- Ideologi	17	0
		- Politik	10	$2,5/3 \times 10 = 8,5$
		- Ekonomi	15	$2,5/3 \times 15 = 12,5$
		- Sosbud	23	$2/3 \times 23 = 20$
		- Hankam	10	$2/3 \times 10 = 8,5$
3	KAOTIK	- Kreatifitas	0	17,5
		- Kekayaan Tradisional	0	15,5
		- Daya Saing	0	15,5
			100	100

Model tolok ukur Ketahanan Regional yang dipakai adalah model tolok ukur Ketahanan Nasional Lemhannas dengan tujuan agar Ketahanan Regional yang diusulkan dapat dikorelasikan terhadap nilai Ketahanan Nasional Indonesia sekaligus sebagai bahan penilaian yang terhadap kondisi nasional Indonesia yang bernuansa internasional. Perlu dijelaskan bahwa pengkajian juga telah dilakukan dengan melihat Konsep Tolok Ukur Ketahanan Nasional lainnya, namun konsep Ketahanan Nasional Lemhannas merupakan Konsep Kuantitatif Relatif yang secara universal telah mengakomodasi unsur-unsur kehidupan secara utuh dan terintegrasi didalam aspek ATHG.

Bertitik tolak dari landasan pemikiran di atas, disusunlah pembobotan aspek pada tabel 1 dengan mengacu pada kekuatan pengaruh dominasi. Klarifikasi tolok ukur yang dipakai adalah klarifikasi Lemhannas dengan alasan agar kajian ketahanan regional dapat

diekstrapolarisasikan terhadap ketahanan nasional.

Adapun proses transformasi nilai Ketahanan Regional pada Ketahanan Nasional dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut

- Nilai Tanreg = X
- Nilai Tanreg tanpa Kaotik = $Y = X - 48,5$
- Transformasi Nilai Tanreg ke nilai Tannas Lemhannas $z = \frac{100}{51,5} \times Y$

sedangkan Klasifikasi Kondisi Ketahanan Regional adalah memakai Klasifikasi Nasional Lemhannas :

- 1-30 Kurang Tangguh
- 31-70 Cukup Tangguh
- 71-100 Tangguh

Dengan demikian secara lengkap diperoleh konsep ketahanan nasional beserta klasifikasi penilaian kondisinya.

KESIMPULAN

Berlandas pada uraian dan pembahasan kajian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yang dikaitkan dengan tujuan penulisan makalah ini mengenai Konsepsi dan Tolok Ukur Ketahanan Regional, yaitu :

1. Interaksi kehidupan manusia saat ini maupun di masa datang dicirikan oleh adanya Global Paradoks yang memuat unsur “*unifying effect*” dan tribalisme yang merupakan potensi konflik antar bangsa yang perlu diantisipasi dan dicegah melalui pendekatan humaniti yang mengan-dalkan penghargaan maksimal terhadap kemampuan intelektual manusia dan naluri manusia dalam menciptakan daya saing.
2. Kolektivitas Daya Saing individu dalam suatu bangsa perlu diselaraskan guna menghasilkan parameter Kaotik yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Meskipun penyelarasan parameter kaotik bergantung pada nilai historis bangsa tetapi sesungguhnya naluri manusia adalah sama yaitu menuju peningkatan kualitas kehidupan manusia.
3. Upaya negara Barat dalam menerapkan sistem nilai baru dalam kehidupan manusia mendapatkan tentangan dari Asia yang memiliki karakteristik dan histori kultur yang berbeda yang disebut tatanan nilai relativitas Asia. Berlandaskan kenyataan tersebut dan orientasi regionalisme global, maka pola interaksi yang
4. Menguatnya regionalisme di dunia ini yang ditandai dengan adanya regionalisasi Amerika Utara, Asia–Pasifik dan Uni Eropa memberikan peluang bagi anggota ASEAN untuk meningkatkan perannya di masa depan. Kekuatan Nasionalisme bangsa Asia Tenggara, akibat perjalanan historisnya, merupakan sarana awal bagi penyelarasan potensi yang dimiliki anggota ASEAN tanpa melupakan kepentingannya masing-masing. Kekuatan ini diarahkan bagi pencapaian maksimal Parameter Kaotik melalui eksplorasi kemampuan pikir spesifik untuk menciptakan daya saing yang diimbangi rasa solidaritas.
5. Berlandaskan kesepakatan dasar ASEAN yang meliputi pengertian bahwa ASEAN bukanlah merupakan badan supranasional dan tidak diarahkan menjadi pakta militer, maka Konsepsi Ketahanan Regional ASEAN dikembangkan dengan prinsip mengidentifikasi dan menyelaraskan aspek yang dapat disinergikan. Kajian makalah ini mengusulkan bahwa dalam Ketahanan Regional ASEAN perlu diadakan prioritas telaah dengan pembobotan aspek statis dan dinamis : aspek Kaotik = 51,5 : 48,5. Argumentasinya adalah bahwa Konsepsi ini dikembangkan

dari konsep Ketahanan Nasional Lemhannas dengan mengeliminasi parameter-parameter yang berpotensi konflik jika diselaraskan. Adapun pemberian bobot yang besar terhadap aspek kaotik adalah ditujukan agar ASEAN lebih proaktif dalam pencapaian daya saing.

6. Tolok Ukur beserta Klasifikasi Ketahanan Regional yang diusulkan adalah modifikasi dari Tolok Ukur Ketahanan Nasional yang dibuat Lemhannas dengan eliminasi parameter sumber konflik. Namun demikian korelasi linier tetap dapat dilakukan agar hasil kajian Ketahanan Regional dengan menggunakan konsep yang diusulkan tetap dapat mengukur kondisi Ketahanan Nasional Indonesia. Juga diusulkan bahwa pengukuran Ketahanan Regional harus dapat dilakukan secara periodik agar kecenderungannya dapat digunakan untuk analisis antisipasi proaktif dan kemandirian ASEAN di masa datang melalui kajian Parameter Kaotik.
4. Wie, T.K, "Raising Indonesia's Competitive Ness", Prosiding Lokakarya Dewan Riset Nasional, Serpong, 11 – 14 Desember 1996.
5. Pengestu, M, "Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia" CSIS, Jakarta 1997.
6. Paribatra, M.K.R, "Preparing ASEAN for the Twenty First Century", The Indonesian Quarterly, CSIS, Volume XXVI No. 3 hal 2-8
7. Hardjosoedarmo, Soewarso RADM, 1991, "Asean dan Tantangan Keamanannya di Tahun Sembilan Puluhan", Telstra, Maret – April.
8. The Technology Atlas Tema, 1987, "Technological Capabilities Assesment in Developing Countries", Special Issue of Technological Forecasting Social Change, Vol. 32, No. 1 August, 118 hal.
9. Munaf, D. R., 1999, "Konsepsi dan Tolok Ukur Ketahanan Regional Dalam Mengantisipasi Akselerasi Dinamika Paradigma Global", Taskap KRA XXXII, November 1999.

DAFTAR PUSTAKA

1. Porter, M, "The Competitive Advantage of Nations", The Free Press, New York, 1990.
2. Suryohadikusumo, S, "Perencanaan Ketahanan Nasional dalam Era Reformasi", Jurnal Ketahanan Nasional, No. IV (!), April 99, hal 1 – 19.
3. Jacob, T, "Ketahanan Nasional dan Milenium Ketiga", Jurnal Ketahanan Nasional, No, IV(1), April 99, hal 211-30.